

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Bone Bolango dalam pengalihan Bantuan Sosial di kabupaten Bone Bolango Kecamatan Tilongkabila termasuk kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan dilaksanakan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango. Program dalam bentuk bantuan ini dilaksanakan sesuai anggaran yang pada pemerintah dijalankan secara bergiliran di setiap kecamatan akan tetapi tergantung pada jumlah penduduk yang termasuk benar-benar ekonominya lemah dan juga sesuai hasil data survey langsung oleh pemerintah pemerintah terkait berdasarkan pertaruan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. .

2. Dampak kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango terkait dengan pengalihan bantuan sosial dari segi positif sangatlah membantu perekonomian yang ada di kecamatan tilongkabila kabupaten Bone Bolango akan tetapi masih ada kekurangan anggaran yang diterima oleh pemerintah dalam melaksanakan bantuan sosial. Hal tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan dan memicu masyarakat yang apatisme dikarenakan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan timbulnya kecemburuan sosial terhadap masyarakat. Dan permasalahan yang telah terjadi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) di Kabupaten Bone Bolanngo Kecamatan Tilongkabila.

5.2. Saran

1. Lebih ditingkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Sosial dari mendatai warga yang benar-benar ekonominya termasuk ekonomi kebawah atau warga yang masih kurang mampu menghidupi keluarganya, dan agar kiranya waktu mendatai hal tersebut dilaksanakan tiap minggunya, sehingga warga yang belum mendatai bisa terkontrol dan lebih terarah bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat yang kurang mampu sesuai Peraturan Dalam Negeri No.39 Tahun 2012.

2. Perlunya strategi yang lebih baik dan persuasif agar pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dapat mengatasi kendala yang dihadapi seperti kendala warga yang belum mendatai diri yang merasakan benar-benar warga yang kurang mampu dan bisa mengatasi masyarakat yang memiliki sikap apatisme terhadap program ini yang menjadi peserta penerima bantuan, adapun pemerintah bisa mengadakan rapat atau sosialisasi kepada warga yang kurang mampu.

3. Perlunya penguatan paradigma kepada aparat pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan selalu memberikan pelayanan yang sesuai peraturan berlaku agar bisa berjalanya program *good governance* di Kabupaten Bone Bolango, dan bisa juga ada perhatian langsung dari Bupati Hamim Pou Kabupaten Bone Bolango proses berjalanya Pengalihan Bantuan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried, 2003, *Hukum Tata pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arifin Tahir, 2005, *Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta; Pustaka Indonesia Press.
- Abdul Latief, 2005, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Pustaka Indonesia Press.
- Agus Dwiyanto, 2004, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, PSH UII.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mudarajad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, strategi dan peluang)*, Erlanga, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Mortir Jedawi, 2001, *Desentralisasi dan Implementasi di Indonesia*, Makalah Program Strata 3 Pascasarjana UNHAS
- Nusa Medi, 2009, *Hukum Pemerintah Daerah, Bandung*, Raja Grafindo Persada
- Nur Pujiyanto, M.Si, 2012, *Peraturan Perundangan-undangan Lingkup Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Bandar Maju
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Jakarta, Raja Gravindo Persada
- S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrsi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, FH-UII Press.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.